

# **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun**

## **Laporan Keuangan Tahunan T.A. 2025 (*audited*)**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Jalan Sutan Syahrir No. 46  
Pangkalan Bun 74111

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalan Bun, 4 Mei 2026  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Ari Fitri Mahesa  
NIP 197407231994032001





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir No 46 Pangkalan Bun, 74111  
Telepon (0532) 21502 Faximile (0532) 21834 Email kpnlpangkalanbun@kemenkeu.go.id

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan (*audited*) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Bun, 4 Mei 2026  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Ari Fitri Mahesa  
NIP 197407231 99403 2 001



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

## **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada sampai dengan semester II Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.706.967.018,00 atau mencapai 191,14 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp893.042.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan semester II Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.711.660.246,00 terdiri dari realisasi belanja barang sebesar Rp1.593.246.746,00 dan belanja modal sebesar Rp118.413.500,00 atau mencapai 32,49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.285.155.000,00. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari alokasi anggaran belanja barang sebesar Rp2.105.855.000,00 dan belanja modal sebesar Rp3.179.300.000,00.

## **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp20.920.921.260,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.012.630.701,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp19.908.290.559,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp971.559.701,00 dan Rp19.949.361.559,00.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.733.804.418,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.128.995.622,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp395.191.204,00 Defisit Kegiatan Non Operasional dan Desifit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp395.191.204,00.

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp19.422.623.306,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp395.191.204,00 kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp921.929.457,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp19.040.361.559,00.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALAN BUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                           | CAT. | 31 DESEMBER TA 2025  |                      | % thd Angg    | TA 2024              |
|----------------------------------|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                  |      | ANGGARAN             | REALISASI            |               | REALISASI            |
| <b>PENDAPATAN</b>                |      |                      |                      |               |                      |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak    | B.1  | 893.042.000          | 1.706.967.018        | 191,14        | 2.185.253.115        |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>         |      | <b>893.042.000</b>   | <b>1.706.967.018</b> | <b>191,14</b> | <b>2.185.253.115</b> |
| <b>BELANJA</b>                   | B.2. |                      |                      |               |                      |
| <b>Belanja Operasi</b>           |      |                      |                      |               |                      |
| Belanja Pegawai                  | B.3  | -                    | -                    | 0,00          | -                    |
| Belanja Barang                   | B.4  | 2.105.855.000        | 1.593.246.746        | 75,66         | 1.816.783.446        |
| Belanja Bantuan Sosial           | B.5  | -                    | -                    | 0,00          | -                    |
| <b>Jumlah Belanja Operasi</b>    |      | <b>2.105.855.000</b> | <b>1.593.246.746</b> | <b>75,66</b>  | <b>1.816.783.446</b> |
| <b>Belanja Modal</b>             |      |                      |                      |               |                      |
| Belanja Tanah                    | B.6  | -                    | -                    | 0,00          | -                    |
| Belanja Peralatan dan Mesin      | B.7  | 275.800.000          | 118.413.500          | <b>42,93</b>  | 186.858.000          |
| Belanja Gedung dan Bangunan      | B.8  | 2.903.500.000        | -                    | <b>0,00</b>   | 295.230.655          |
| Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan | B.9  | -                    | -                    | 0,00          | -                    |
| Belanja Modal lainnya            | B.10 | -                    | -                    | 0,00          | -                    |
| <b>Jumlah Belanja Modal</b>      |      | <b>3.179.300.000</b> | <b>118.413.500</b>   | <b>0,00</b>   | <b>482.088.655</b>   |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>            |      | <b>5.285.155.000</b> | <b>1.711.660.246</b> | <b>32,39</b>  | <b>2.298.872.101</b> |

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## II. NERACA

### KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALAN BUN NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                                                   | CATATAN    | 31 Desember 2025         | 31 Desember 2024         |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ASET</b>                                              |            |                          |                          |
| <b>ASET LANCAR</b>                                       | <b>C.1</b> |                          |                          |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                             | C.1.1      |                          | -                        |
| Kas di Bendahara Penerimaan                              | C.1.2      | 500.000                  | -                        |
| Kas Lainnya dan Setara Kas                               | C.1.3      | 971.559.701,00           | 6.178.338,00             |
| Piutang PNB                                              | C.1.4      | -                        | -                        |
| Bagian Lancar TP/TGR                                     | C.1.5      | -                        | -                        |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran                 | C.1.6      | -                        | -                        |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek  | C.1.7      | -                        | -                        |
| Belanja Dibayar di Muka                                  | C.1.8      | -                        | -                        |
| Pendapatan yang Masih Harus Diterima                     | C.1.9      | 26.337.400               | -                        |
| Persediaan                                               | C.1.10     | 14.233.600               | 19.899.950               |
| Jumlah Aset Lancar                                       |            | 1.012.630.701,00         | 26.078.288               |
| <b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>                            | <b>C.3</b> |                          |                          |
| Tagihan TP/TGR                                           | C.3.1      | -                        | -                        |
| Tagihan Penjualan Angsuran                               | C.3.2      | -                        | -                        |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang | C.3.3      | -                        | -                        |
| Jumlah Piutang Jangka Panjang                            |            | -                        | -                        |
| <b>ASET TETAP</b>                                        | <b>C.2</b> |                          |                          |
| Tanah                                                    | C.2.1      | 12.620.803.000           | 12.620.803.000           |
| Peralatan dan Mesin                                      | C.2.2      | 4.624.522.231            | 3.821.213.608            |
| Gedung dan Bangunan                                      | C.2.3      | 7.274.660.655            | 7.274.660.655            |
| Jalan Irigasi dan Jaringan                               | C.2.4      | -                        | -                        |
| Aset Tetap Lainnya                                       | C.2.5      | 1.672.000                | 1.672.000                |
| Konstruksi dalam pengerjaan                              | C.2.6      | -                        | -                        |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                          | C.2.7      | (4.613.367.327)          | (4.304.119.378)          |
| Jumlah Aset Tetap                                        |            | 19.908.290.559           | 19.414.229.885           |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                      | <b>C.4</b> |                          |                          |
| Aset Tak Berwujud                                        | C.4.1      | -                        | -                        |
| Aset Lain-Lain                                           | C.4.2      | 287.046.541              | 2.139.041                |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya         | C.4.3      | (287.046.541)            | (2.139.041)              |
| Jumlah Aset Lainnya                                      |            | -                        | -                        |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                       |            | <b>20.920.921.260,00</b> | <b>19.440.308.173,00</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                         |            |                          |                          |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                           | <b>C.5</b> |                          |                          |
| Uang Muka dari KPPN                                      | C.5.1      |                          |                          |
| Utang kepada Pihak Ketiga                                | C.5.2      | 971.559.701              | 17.684.867               |
| Utang Yang Belum Ditagihkan                              | C.5.3      | -                        | -                        |
| Beban yang Masih Harus Dibayar                           | C.5.4      | -                        | -                        |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek                           |            | 971.559.701,00           | 17.684.867,00            |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                                  |            | <b>971.559.701,00</b>    | <b>17.684.867,00</b>     |
| <b>EKUITAS</b>                                           |            |                          |                          |
| Ekuitas                                                  | C.7        | 19.949.361.559           | 19.422.623.306           |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                    |            | <b>19.949.361.559</b>    | <b>19.422.623.306</b>    |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                      |            | <b>20.920.921.260</b>    | <b>19.440.308.173</b>    |

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PANGKALAN BUN  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                                                      | CAT  | 31 Desember 2025     | 31 Desember 2024     |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                 |      |                      |                      |
| <b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>                               |      |                      |                      |
| <b>Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>                        |      |                      |                      |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya                       | D.1  | 1.733.804.418        | 2.177.809.115        |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>                        |      | <b>1.733.804.418</b> | <b>2.177.809.115</b> |
| <b>BEBAN OPERASIONAL</b>                                    |      |                      |                      |
| Beban Pegawai                                               | D.2  | -                    | -                    |
| Beban Persediaan                                            | D.3  | 69.337.350           | 34.091.300           |
| Beban Barang dan Jasa                                       | D.4  | 860.575.153          | 916.164.916          |
| Beban Pemeliharaan                                          | D.5  | 384.507.130          | 524.664.647          |
| Beban Perjalanan Dinas                                      | D.6  | 282.372.463          | 335.961.658          |
| Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat             | D.7  | -                    | -                    |
| Beban Bantuan Sosial                                        | D.8  | -                    | -                    |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                             | D.9  | 532.203.526          | 403.091.859          |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                       | D.10 | -                    | -                    |
| Beban Lain-lain                                             | D.11 | -                    | -                    |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                         |      | <b>2.128.995.622</b> | <b>2.213.974.380</b> |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL                 |      | <b>(395.191.204)</b> | <b>(36.165.265)</b>  |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                             | D.12 |                      |                      |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset non lancar                   |      | -                    | 7.308.700            |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar                        |      | -                    | 7.444.000            |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                             |      | -                    | -                    |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya       |      | -                    | -                    |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya            |      | -                    | -                    |
| Beban Pelepasan Kewajiban Jangka Panjang                    |      | -                    | -                    |
| <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> |      | <b>-</b>             | <b>7.308.700</b>     |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA                      |      | <b>(395.191.204)</b> | <b>(28.856.565)</b>  |
| <b>POS LUAR BIASA</b>                                       | D.13 | -                    | -                    |
| <b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>                                   |      | <b>(395.191.204)</b> | <b>(28.856.565)</b>  |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PANGKALAN BUN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

*(Dalam Rupiah)*

| URAIAN                                         | CAT.       | 31 Desember 2025      | 31 Desember 2024      |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| EKUITAS AWAL                                   | E.1        | 19.422.623.306        | 19.322.242.135        |
| SURPLUS/DEFISIT LO                             | E.2        | - 395.191.204         | - 28.856.565          |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI | E.3        | 0                     | 0                     |
| KOREKSI YG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS         |            | 0                     | 0                     |
| PENYESUAIAN NILAI ASET                         | E.3.1      | 0                     | 0                     |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                       | E.3.2      | 0                     | 0                     |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI                     | E.3.3      | 0                     | 0                     |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP                   | E.3.4      | 0                     | 0                     |
| KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI         | E.3.5      | 0                     | 0                     |
| KOREKSI LAIN-LAIN                              | E.3.6      | 0                     | 0                     |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS                        | E.4        | 921.929.457           | 129.237.736           |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS                     | E.5        | 526.738.253           | 100.381.171           |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                           | <b>E.6</b> | <b>19.949.361.559</b> | <b>19.422.623.306</b> |

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun

*Dasar*

*Hukum*

*Entitas dan*

*Rencana*

*Strategis*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6/2006 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-466/01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No.46, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun berkomitmen dengan visi ***“menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang di wilayah Kalimantan Tengah yang bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”***

Kebijakan teknis meliputi bidang-bidang dan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

- a. Bidang Kekayaan Negara meliputi : melaksanakan koordinasi dan sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, penatausahaan Satuan Kerja Pengguna Barang, inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara, mengoptimalkan penggunaan, pengamanan/ pemeliharaan, penatausahaan Kekayaan Negara; hingga kebijakan;

- b. Bidang Piutang Negara, meliputi: mengoptimalkan pelayanan pengelolaan Piutang negara, melaksanakan koordinasi dengan para penyerah piutang;
- c. Bidang Lelang, meliputi: optimalisasi pelayanan lelang, sosialisasi dan koordinasi dengan pemohon lelang;
- d. Bidang Hukum dan Informasi, meliputi: optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penanganan/pengiriman laporan dan penanganan perkara perdata/TUN di lembaga peradilan;
- e. Bidang Kesekretariatan, meliputi: memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan kedinasan dan non kedinasan, kesempatan menduduki jabatan struktural, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan dan pendidikan, optimalisasi penyusunan Rencana Anggaran, pengawasan pelaksanaan Anggaran Belanja dan administrasi perkantoran.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

### *Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Semester II TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya

untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.3. Basis Akuntansi**

#### *Basis Akuntansi*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.4. Dasar Pengukuran**

#### *Dasar Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

##### *Kebijakan Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun adalah sebagai berikut:

##### **(1) Pendapatan-LRA**

##### *Pendapatan- LRA*

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### **(2) Pendapatan- LO**

##### *Pendapatan- LO*

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya

aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Bea Lelang diakui saat Barang Terjual
- b. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
- c. Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3) Belanja**

#### *Belanja*

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **(4) Beban**

#### *Beban*

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **(5) Aset**

### *Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### **a. Aset Lancar**

#### *Aset Lancar*

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
  - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

*Tabel 1.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih*

| <b>Kualitas Piutang</b> | <b>Uraian</b>                                                                      | <b>Penyisihan</b> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Lancar                  | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo                                 | 0,5%              |
| Kurang Lancar           | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10%               |
| Diragukan               | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan   | 50%               |
| Macet                   | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan  | 100%              |

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

##### *Aset Tetap*

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

### **c. Penyusutan Aset Tetap**

#### *Penyusutan Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 1.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

| <b>Kelompok Aset Tetap</b>   | <b>Masa Manfaat</b> |
|------------------------------|---------------------|
| Peralatan dan Mesin          | 2 s.d. 20 tahun     |
| Gedung dan Bangunan          | 10 s.d. 50 tahun    |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 5 s.d. 40 tahun     |
| Aset Tetap Lainnya           | 4 tahun             |

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

#### **e. Aset Lainnya**

##### *Aset Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 1.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

| <b>Kelompok Aset Tetap</b>                                                                             | <b>Masa Manfaat</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Software                                                                                               | 4 tahun             |
| Franchise                                                                                              | 5 tahun             |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10 tahun            |
| Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim                     | 20 tahun            |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan                                    | 25 tahun            |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram          | 50 tahun            |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I                                                                          | 70 tahun            |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## **(6) Kewajiban**

### *Kewajiban*

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak

Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

*Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Penjelasan atas  
Pos Laporan  
Realisasi  
Anggaran

Satuan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp5.285.155.000,00 pada tahun 2025. Sampai dengan semester II TA 2025, terdapat revisi anggaran yang menyebabkan perubahan jumlah pagu anggaran pada KPKNL Pangkalan Bun. Rincian anggaran pada DIPA KPKNL Pangkalan Bun TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Anggaran pada DIPA

| Uraian                               | ANGGARAN TA 2025 |                |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
|                                      | AWAL             | SETELAH REVISI |
| <b>Pendapatan</b>                    |                  |                |
| Pendapatan Perpajakan                | 0                | 0              |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 893.042.000      | 893.042.000    |
| Jumlah Pendapatan                    | 893.042.000      | 893.042.000    |
| <b>Belanja</b>                       |                  |                |
| Belanja Pegawai                      | 0                | 0              |
| Belanja Barang                       | 2.058.855.000    | 2.105.855.000  |
| Belanja Modal                        | 3.041.400.000    | 3.179.300.000  |
| Belanja Bantuan Sosial               | 0                | 0              |
| Jumlah Belanja                       | 5.100.255.000    | 5.285.155.000  |

**B.1. Pendapatan**

Realisasi  
Pendapatan  
Rp1.706.967.018,  
00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.706.967.018,00 atau mencapai 191,14 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp893.042.000,00. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun hanya terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.2 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

| Uraian                                                  | Semester II TA 2025 |                      |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                                                         | Anggaran            | Realisasi            | % Real Angg.  |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin           | -                   | -                    | -             |
| Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya            | -                   | -                    | -             |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan             | -                   | -                    | -             |
| Pendapatan Jasa Lainnya                                 | -                   | 500.000              | -             |
| Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I            | 655.387.000         | 1.611.938.569        | 245,95        |
| Pendapatan Bea Lelang Pegadaian                         | 237.368.000         | 92.498.574           | 38,97         |
| Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara | 287.000             | 2.309.317            | 804,64        |
| Pendapatan Anggaran Lain-lain                           | -                   | 2.632.258            | -             |
| <b>Jumlah</b>                                           | <b>893.042.000</b>  | <b>1.709.878.718</b> | <b>191,47</b> |

Sampai dengan 31 Desember 2025, Pendapatan yang diperoleh oleh KPKNL Pangkalan Bun mengalami kenaikan sekitar 191,14 persen dari periode yang sama pada TA 2024. Perbandingan realisasi PNPB TA 2025 dan TA 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

*Tabel 2.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan periode 31 Desember 2025 dan TA 2024*

| URAIAN                                                                                  | REALISASI Smt II 2025 | REALISASI Smt II 2024 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin                                           | -                     | 1.607.000,00          | 0,00           |
| Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya                                            | -                     | 5.837.000,00          | 0,00           |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                                             | -                     | -                     | 0,00           |
| Pendapatan Jasa Lainnya                                                                 | 500.000               | 225.500               | 0,00           |
| Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I                                            | 1.611.938.569         | 2.074.837.355         | -22,31         |
| Pendapatan Bea Lelang Pegadaian                                                         | 92.498.574            | 97.896.868            | -5,51          |
| Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara                                              | 2.309.317             | 351.695               | 556,62         |
| Pendapatan Lain-lain                                                                    | 2.632.258             | 1.639.697             | 60,53          |
| Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang tidak Diambil oleh yang Berhak | -                     | -                     | 0,00           |
| <b>Jumlah</b>                                                                           | <b>1.709.878.718</b>  | <b>2.182.395.115</b>  | <b>-21,65</b>  |

## B.2. Belanja

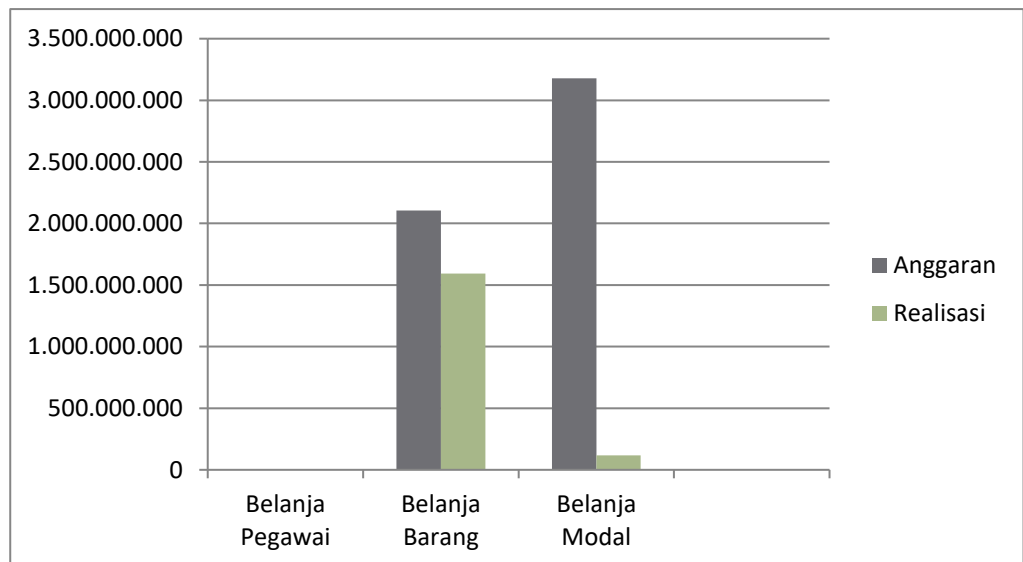
*Realisasi Belanja  
Negara  
Rp1.711.660.246,  
00*

Realisasi Belanja instansi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.711.660.246,00 atau 32,39 persen dari anggaran belanja yaitu sebesar Rp5.285.155.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025*

| Uraian                     | TA 2025              |                      |              |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                            | Anggaran             | Realisasi            | % Real Angg. |
| Belanja Pegawai            | -                    | -                    | -            |
| Belanja Barang             | 2.105.855.000        | 1.593.246.746        | 75,66        |
| Belanja Modal              | 3.179.300.000        | 118.413.500          | 3,72         |
| <b>Total Belanja Kotor</b> | <b>5.285.155.000</b> | <b>1.711.660.246</b> | <b>32,39</b> |
| Pengembalian Belanja       | -                    | -                    | -            |
| <b>Jumlah</b>              | <b>5.285.155.000</b> | <b>1.711.660.246</b> | <b>32,39</b> |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 25,54 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya blokir anggaran belanja modal mengikuti kebijakan efisiensi anggaran. Perbandingan realisasi belanja periode semester II TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 2.5 Perbandingan Realisasi Belanja Semester I 2025 dan 2024*

| URAIAN          | REALISASI<br>Smt II 2025 | REALISASI<br>Smt II 2024 | NAIK<br>(TURUN)<br>% |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Belanja Pegawai | -                        | -                        | -                    |
| Belanja Barang  | 1.593.246.746            | 1.816.783.446            | (12,30)              |
| Belanja Modal   | 118.413.500              | 482.088.655              | (75,44)              |
| <b>Jumlah</b>   | <b>1.711.660.246</b>     | <b>2.298.872.101</b>     | <b>(25,54)</b>       |

### **B.3. Belanja Pegawai**

*Belanja Pegawai  
Rp0*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh sentralisasi belanja pegawai yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat DJKN dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

### **B.4. Belanja Barang**

*Belanja Barang  
Rp1.593.246.746,  
00*

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.593.246.746,00 dan Rp1.816.783.446,00. Realisasi Belanja Barang semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar 12,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya blokir anggaran yang mengikuti kebijakan efisiensi anggaran. Perbandingan realisasi belanja barang semester II TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 2.6 Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2025 dan 2024*

| URAIAN                          | REALISASI<br>SMT II TA 2025 | REALISASI<br>SMT II TA 2024 | NAIK<br>(TURUN) % |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Belanja Barang Operasional      | 837.325.445                 | 732.544.385                 | 14,30             |
| Belanja Barang Non Operasional  | 25.169.208                  | 41.885.400                  | (39,91)           |
| Belanja Barang Persediaan       | 63.671.000                  | 38.387.500                  | 65,86             |
| Belanja Jasa                    | 201.500                     | 143.339.856                 | (99,86)           |
| Belanja Pemeliharaan            | 384.507.130                 | 524.664.647                 | (26,71)           |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 282.372.463                 | 335.961.658                 | (15,95)           |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>     | <b>1.593.246.746</b>        | <b>1.816.783.446</b>        | <b>(12,30)</b>    |
| Pengembalian Belanja            | -                           | -                           | -                 |
| <b>Jumlah Belanja</b>           | <b>1.593.246.746</b>        | <b>1.816.783.446</b>        | <b>(12,30)</b>    |

## B.5. Belanja Modal

Belanja Modal  
Rp118.413.500,0  
0

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp118.413.500,00 dan Rp482.088.655. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 75,44 persen dibandingkan dengan TA 2024 disebabkan adanya efisiensi anggaran. Pada TA 2025, anggaran belanja modal digunakan diblokir sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran.

*Tabel 2.7 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II 2025 dan 2024*

| URAIAN                                     | REALISASI<br>SEMESTER II TA 2025 | REALISASI<br>SEMESTER II TA 2024 | NAIK<br>(TURUN) % |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Belanja Modal Tanah                        | 0                                | 0                                | -                 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 118.413.500                      | 186.858.000                      | (36,63)           |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 0                                | 295.230.655                      | (100,00)          |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0                                | 0                                | -                 |
| Belanja Modal Lainnya                      | -                                | -                                | -                 |
| Jumlah Belanja                             | 118.413.500                      | 482.088.655                      | (75,44)           |

### B.5.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal  
Tanah Rp0

Pada Tahun Anggaran 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun tidak memiliki Belanja Modal Tanah.

### B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp118.413.500,0  
0

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp118.413.500,00 dan Rp186.858.000,00. Terjadi penurunan realisasi belanja modal sebesar 36,63 persen yang disebabkan kebijakan efisiensi anggaran. Belanja modal peralatan dan mesin pada TA 2025 diblokir sesuai kebijakan efisiensi anggaran. Perbandingan realisasi belanja modal

peralatan dan mesin semester II TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 2.8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 dan 2024*

| URAIAN                                 | REALISASI<br>SEMESTER I TA 2025 | REALISASI<br>SEMESTER I TA 2024 | NAIK<br>(TURUN) % |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 0                               | 22.500.000                      | 100,00            |
| Peralatan dan Fasilitas Perkantoran    | 118.413.500                     | 136.958.000                     | (13,54)           |
| Kendaraan Bermotor                     | 0                               | 27.400.000                      | (100,00)          |
| Pengembalian                           | -                               | -                               | -                 |
| <b>Jumlah Belanja</b>                  | <b>118.413.500</b>              | <b>186.858.000</b>              | <b>(36,63)</b>    |

### B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan Rp0*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp295.230.655,00. Terjadi penurunan realisasi belanja modal sebesar 100 persen yang disebabkan kebijakan efisiensi anggaran. Belanja modal gedung dan bangunan pada TA 2025 diblokir sesuai kebijakan efisiensi anggaran. Perbandingan realisasi belanja modal gedung dan bangunan semester II TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 2.9 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025 dan 2024*

| URAIAN                               | REALISASI<br>SEMESTER II TA 2025 | REALISASI<br>SEMESTER II TA 2024 | NAIK<br>(TURUN) % |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 0                                | 295.230.655                      | 100,00            |
|                                      | -                                | -                                | -                 |
| <b>Jumlah Belanja</b>                | <b>0</b>                         | <b>295.230.655</b>               | <b>100,00</b>     |

### B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi, dan  
Jaringan Rp0*

Pada Tahun Anggaran 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun tidak memiliki Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

#### **B.6. Belanja Bantuan Sosial**

*Belanja Bantuan  
Sosial Rp0*

Pada Tahun Anggaran 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun tidak memiliki Belanja Bantuan Sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar  
Rp1.012.630.701,0  
0

Jumlah Aset Lancar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.012.630.701,00 dan Rp26.078.288,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang tertera pada rekening Koran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Rekening Virtual Account merupakan pengganti dari rekening BRI (0282-01-000441-30-7) karena telah dilakukan penutupan pada rekening tersebut. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran menurut LPJ Bendahara Pengeluaran TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

| Keterangan                                 | TA 2025 | TA 2024 |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Uang Persediaan</b>                     |         |         |
| Rekening Virtual Account (650095063331000) | -       | -       |
| Uang Tunai                                 | -       | -       |
| SPM yang belum SP2D                        | -       | -       |
| UP yang belum di-SPM-kan                   | -       | -       |
| Pembulatan                                 | -       | -       |
| <b>Jumlah</b>                              | -       | -       |

### C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp500.000,00*

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang tertera pada rekening Koran per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp500.000,00. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 3.2 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan*

| Keterangan                     | TA 2025        | TA 2024  |
|--------------------------------|----------------|----------|
| Uang Tunai                     | -              | -        |
| Bank BRI (0282-01-000445-30-1) | -              | -        |
| Bank BRI (0282-01-000798-30-6) | 500.000        | -        |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>500.000</b> | <b>-</b> |

### C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp971.559.701,00*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp971.559.701,00 dan Rp6.178.338,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada semester II TA 2025 terdiri dari Hasil Bersih Lelang eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga sebesar Rp671.124.539,00 dan lain-lain lelang sebesar Rp353.835.740,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.3 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

| Jenis                                                                         | TA 2025            | TA 2024          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil                                        | -                  | -                |
| Bea Permohonan Lelang                                                         | -                  | -                |
| Hak Penyerah Piutang                                                          | -                  | -                |
| Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara                              | -                  | -                |
| Kelebihan pelunasan hasil lelang                                              | -                  | -                |
| Hasil Bersih Lelang eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga | 671.124.539        | -                |
| Lain-lain Lelang                                                              | 300.435.162        | 6.178.338        |
| Kelebihan angsuran Hutang yang tidak diambil oleh yang berhak                 | -                  | -                |
| Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi                      | -                  | -                |
| <b>Jumlah</b>                                                                 | <b>971.559.701</b> | <b>6.178.338</b> |

#### **C.1.4. Piutang Bukan Pajak**

*Piutang PNB*

*Rp26.337.400,00*

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada KPKNL Pangkalan Bun masing-masing adalah sebesar Rp26.337.400,00 dan Rp.0, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 3.4 Rincian Piutang Bukan Pajak*

| Uraian          | TA 2025           | TA 2024  |
|-----------------|-------------------|----------|
| Piutang PNB     | 26.337.400        | -        |
| Piutang Lainnya | -                 | -        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>26.337.400</b> | <b>-</b> |

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

#### **C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp0*

Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun pada TA 2025 tidak memiliki Bagian Lancar TP/TGR. Saldo Bagian Lancar TP/TGR per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

#### **C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

*Bagian Lancar TPA  
Rp0*

Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun pada TA 2024 tidak memiliki Bagian Lancar TPA. Saldo Bagian Lancar TPA per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

#### **C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar**

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Lancar  
Rp 0*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun pada TA 2025 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Tabel 3.5 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar*

| Kualitas Piutang                              | Nilai Piutang jk Pendek | % Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| <b>Piutang Bukan Pajak</b>                    |                         |              |                  |
| Lancar                                        | -                       | 0,5%         | -                |
| Kurang Lancar                                 | -                       | 10%          | -                |
| Diragukan                                     | -                       | 50%          | -                |
| Macet                                         | -                       | 100%         | -                |
| <b>Jumlah</b>                                 | -                       |              | -                |
| <b>Bagian Lancar TP/TGR</b>                   |                         |              |                  |
| Lancar                                        | -                       | 0,5%         | -                |
| Kurang Lancar                                 | -                       | 10%          | -                |
| Diragukan                                     |                         | 50%          | -                |
| Macet                                         |                         | 100%         | -                |
| <b>Jumlah</b>                                 | -                       |              | -                |
| <b>Bagian Lancar TPA</b>                      |                         |              |                  |
| Lancar                                        | -                       | 0,5%         | -                |
| Kurang Lancar                                 | -                       | 10%          | -                |
| Diragukan                                     |                         | 50%          | -                |
| Macet                                         |                         | 100%         | -                |
| <b>Jumlah</b>                                 | -                       |              | -                |
| <b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b> | -                       |              | -                |

#### **C.1.8. Beban Dibayar di Muka**

*Belanja Dibayar di Muka Rp0*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun pada TA 2025 tidak memiliki Beban Dibayar di Muka. Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Tabel 3.6 Rincian Belanja Dibayar di Muka*

| Jenis                               | TA 2025 | TA 2024 |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Pembayaran Internet                 | -       | -       |
| Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin | -       | -       |
| Pembayaran Sewa Gedung Kantor       | -       | -       |
| <b>Jumlah</b>                       | -       | -       |

C.1.9. Persediaan

Persediaan  
Rp14.233.600,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp14.233.600,00 dan Rp19.899.950,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rincian Persediaan

| Persediaan               | TA 2025    | TA2024     |
|--------------------------|------------|------------|
| Barang Konsumsi          | 14.233.600 | 19.899.950 |
| Bahan untuk Pemeliharaan | -          | -          |
| Bahan Baku               | -          | -          |
| Jumlah                   | 14.233.600 | 19.899.950 |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap  
Rp19.908.290.559,00

Saldo Aset Tetap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp19.908.290.559,00 dan Rp19.414.229.885,00. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah  
Rp12.620.803.000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun per 31 Desember

2025 dan 31 Desember 2024 adalah sama, yaitu sebesar Rp12.620.803.000,00 Nilai tanah tetap karena tidak terdapat penambahan, penilaian kembali maupun penyusutan terhadap tanah tersebut pada TA 2025. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Rincian Mutasi Tanah

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025 | 12.620.803.000 |
| Mutasi tambah:                           |                |
| Pembelian                                | 0              |
| Mutasi kurang:                           |                |
| Penyitaan pengadilan                     | 0              |
| Desember 2025                            | 12.620.803.000 |

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rincian Tanah

| No     | Luas     | Lokasi                                | Nilai          |
|--------|----------|---------------------------------------|----------------|
| 1      | 2.918 m2 | Jl. Sutan Syahrir No.46 Pangkalan Bun | 12.620.803.000 |
| Jumlah |          |                                       | 12.620.803.000 |

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan  
Mesin  
Rp4.624.522.231,0  
0

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.624.522.231,00 sedangkan saldo nilai perolehan per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp3.821.213.608,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025   | 3.821.213.608   |
| Mutasi tambah:                             | 1.088.216.123   |
| Pembelian                                  | 118.413.500     |
| Transfer Masuk                             | 969.802.623     |
| Mutasi kurang:                             | 284.907.500     |
| Penghentian dari penggunaan                | 284.907.500     |
| Saldo per 31 Desember 2025                 | 4.624.522.231   |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 | (3.371.379.157) |
| Nilai Buku Per 31 Desember 2025            | 1.253.143.074   |

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Transfer masuk 2 unit kendaraan bermotor senilai Rp867.326.923,00.
- 2. Transfer masuk 9 unit lap top senilai Rp102.475.700,00.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**C.2.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan  
Bangunan  
Rp7.274.660.655,0  
0

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.274.660.655,00 sedangkan saldo nilai perolehan per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp7.274.660.655,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.11 Mutasi Gedung dan Bangunan*

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025   | 7.274.660.655   |
| Mutasi tambah:                             | -               |
| Mutasi kurang:                             | -               |
| Saldo per 31 Desember 2025                 | 7.274.660.655   |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 | (1.241.988.170) |
| Nilai Buku Per 31 Desember 2025            | 6.032.672.485   |

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, Jaringan  
dan Irigasi Rp0

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun pada TA 2025 tidak memiliki Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap  
Lainnya  
Rp1.672.000

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sama, yaitu Rp1.672.000. Aset tetap tersebut berupa koleksi buku perpustakaan.

Tabel 3.12 Mutasi Aset Tetap Lainnya

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025 | 1.672.000 |
| Mutasi tambah:                           | -         |
| Mutasi kurang:                           | -         |
| Saldo per 31 Desember 2025               | 1.672.000 |
| Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025    | -         |
| Nilai Buku per 31 Desember 2025          | 1.672.000 |

Rincian Aset Tetap Lainnya beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan Rp0

Saldo KDP per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp4.613.367.327,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.613.367.327,00 dan Rp4.304.119.378,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah

dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025:

Tabel 3.13 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No     | Aset Tetap          | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku    |
|--------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 1.     | Peralatan dan Mesin | 4.624.522.231   | 3.371.379.157        | 1.253.143.074 |
| 2.     | Gedung dan Bangunan | 7.274.660.655   | 1.241.988.170        | 6.032.672.485 |
| 3.     | Aset Tetap Lainnya  | 1.672.000       | -                    | 1.672.000     |
| Jumlah |                     | 11.900.854.886  | 4.613.367.327        | 7.287.487.559 |

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah sama, yaitu Rp0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

C.3.1. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun pada TA 2025 tidak memiliki Tagihan TP/TGR. Saldo Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan  
Angsuran  
Rp0

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun pada TA 2025 tidak memiliki TPA. Saldo TPA per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

C.3.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun pada TA 2025 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tabel 3.14 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

| Kualitas Piutang                       | Nilai Piutang Jk Panjang | % Penyisihan | Nilai Penyisihan |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| Tagihan TP/TGR                         |                          |              |                  |
| Lancar                                 | -                        | 0,5%         | -                |
| Kurang Lancar                          | -                        | 10%          | -                |
| Diragukan                              | -                        | 50%          | -                |
| Macet                                  | -                        | 100%         | -                |
| Jumlah                                 | -                        |              | -                |
| Tagihan PA                             |                          |              |                  |
| Lancar                                 | -                        | 0,5%         | -                |
| Kurang Lancar                          | -                        | 10%          | -                |
| Diragukan                              | -                        | 50%          | -                |
| Macet                                  | -                        | 100%         | -                |
| Jumlah                                 | -                        |              | -                |
| Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih | -                        |              | -                |

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya  
Rp0

Saldo Aset Lainnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun terdiri dari Aset Lain-lain.

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud  
Rp0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun pada TA 2025 tidak memiliki Aset Tak Berwujud. Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sama, yaitu sebesar Rp0.

Tabel 3.15 Mutasi Aset Tak Berwujud

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025   | - |
| Mutasi tambah:                             |   |
| Pembelian                                  | - |
| Mutasi kurang:                             | - |
| Saldo per 31 Desember 2025                 | - |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 | - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2025            | - |

Aset Lain-Lain  
Rp287.046.541,00

C.4.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp287.046.541,00 dan Rp2.139.041,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Mutasi Aset Lain-Lain

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025</b> | <b>2.139.041</b>   |
| <b>Mutasi tambah:</b>                           | 284.907.500        |
| Penghentian Aset dari penggunaan                | 284.907.500        |
| <b>Mutasi kurang:</b>                           | -                  |
| Penggunaan kembali BMN yang dihentikan          | -                  |
| Penghapusan BMN                                 | -                  |
| <b>Saldo per 31 Desember 2025</b>               | <b>287.046.541</b> |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025      | -                  |
| <b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>          | <b>287.046.541</b> |

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp287.046.541,00*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Rp287.046.541 dan Rp2.139.041. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya*

| Aset Tetap     | Nilai Perolehan   | Akumulasi<br>Penyusutan/<br>Amortisasi | Nilai Buku          |
|----------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Aset Lain-lain | -2.139.041        | 284.907.500                            | -287.046.541        |
| <b>Jumlah</b>  | <b>-2.139.041</b> | <b>284.907.500</b>                     | <b>-287.046.541</b> |

#### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka  
Pendek  
Rp971.559.701,00*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp971.559.701 dan Rp17.684.867.

#### **C.5.1. Uang Muka dari KPPN**

*Uang Muka dari  
KPPN Rp0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar

#### **C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga**

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp971.559.701,00*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp971.559.701 dan Rp17.684.867. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

#### **C.5.3. Utang Yang Belum Ditagihkan**

*Utang yang belum  
ditagihkan Rp0*

Utang yang belum ditagihkan merupakan Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga belum diserahkan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun pada TA 2025 memiliki utang yang belum ditagihkan berupa Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp0. Saldo utang yang belum ditagihkan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp0 dan Rp0.

#### **C.7. Ekuitas**

*Ekuitas*

*Rp19.949.361.559,  
00*

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.949.361.559,00 dan Rp19.422.623.306,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan  
PNBP  
Rp1.733.804.418  
,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.733.804.418,00 dan Rp2.177.809.115,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel 4.1 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2025 dan 2024*

| URAIAN                                | TA 2025       | TA 2024       | NAIK<br>(TURUN) % |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 1.733.804.418 | 2.177.809.115 | -20,39%           |
| Jumlah                                | 1.733.804.418 | 2.177.809.115 | -20,39%           |

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa PNBP Lainnya meliputi Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

**D.2. Beban Pegawai**

Beban Pegawai  
Rp0

Jumlah Beban Pegawai pada semester II TA 2025 dan TA 2024 adalah sama, yaitu sebesar Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 4.2 Rincian Beban Pegawai Semester II TA 2025 dan 2024*

| URAIAN JENIS BEBAN                     | TA 2025  | TA 2024  | NAIK<br>(TURUN) |
|----------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Beban Gaji Pokok PNS                   | -        | -        | -               |
| Beban Pembulatan Gaji PNS              | -        | -        | -               |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS            | -        | -        | -               |
| Beban Tunj. Anak PNS                   | -        | -        | -               |
| Beban Tunj. Struktural PNS             | -        | -        | -               |
| Beban Tunj. Fungsional PNS             | -        | -        | -               |
| Beban Tunj. PPh PNS                    | -        | -        | -               |
| Beban Tunj. Beras PNS                  | -        | -        | -               |
| Beban Uang Makan PNS                   | -        | -        | -               |
| Beban Tunjangan Umum PNS               | -        | -        | -               |
| Beban Uang Lembur                      | -        | -        | -               |
| Pengembalian belanja pegawai           | -        | -        | -               |
| Beban Pegawai yang masih harus dibayar | -        | -        | -               |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>     |

### **D.3. Beban Persediaan**

*Beban  
Persediaan  
Rp69.337.350,00*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp69.337.350,00 dan Rp34.091.300,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk semester II TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.3 Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2025 dan 2024*

| URAIAN JENIS BEBAN                        | 30 Juni 2025      | 30 Juni 2024      | NAIK<br>(TURUN) % |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beban Persediaan Konsumsi                 | 69.337.350        | 34.091.300        | 103,39%           |
| Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan | -                 | -                 | -                 |
| Beban Persediaan Bahan Baku               | -                 | -                 | -                 |
| <b>Jumlah Beban Persediaan</b>            | <b>69.337.350</b> | <b>34.091.300</b> | <b>103,39%</b>    |

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang  
dan Jasa  
Rp860.575.153,0  
0*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp860.575.153 dan Rp916.164.916. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Jasa pada semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar 6,068 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terjadi kebijakan efisiensi anggaran. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.4 Rincian Beban Jasa Semester II TA 2025 dan 2024*

| URAIAN JENIS BEBAN                     | 31 Desember 2025   | 31 Desember 2024   | NAIK (TURUN) % |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Beban Keperluan Perkantoran            | 648.842.200        | 638.704.085        | 1,59%          |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh        | 19.002.745         | 7.736.200          | 145,63%        |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat | 20.644.500         | 22.205.100         | -7,03%         |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja   | 97.540.000         | 64.752.000         | 50,64%         |
| Beban Barang Operasional Lainnya       | 49.175.000         | 0                  | #DIV/0!        |
| Beban Bahan                            | 23.598.208         | 39.918.000         | -40,88%        |
| Beban Barang Non-Operasional Lainnya   | 1.571.000          | 1.967.400          | -20,15%        |
| Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya  | 201.500            | 140.882.131        | -99,86%        |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>860.575.153</b> | <b>916.164.916</b> | <b>-6,07%</b>  |

**D.5. Beban Pemeliharaan**

Beban  
Pemeliharaan  
Rp384.507.130,0  
0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp384.507.130 dan Rp524.664.647. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan pada semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar 26,71 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya efisiensi anggaran. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.5 Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2025 dan 2024*

| URAIAN JENIS BEBAN                                                   | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                               | 260.890.090      | 350.863.250      | -25,64%        |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                               | 123.617.040      | 173.801.397      | -28,87%        |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19 | 0                | 0                | 0,00%          |
| Jumlah                                                               | 384.507.130      | 524.664.647      | -26,71%        |

**D.6. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp282.372.463,0  
0

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp282.372.463 dan Rp335.961.658. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas pada semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar 15,95 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan adanya efisiensi anggaran. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2025 dan 2024

| URAIAN JENIS BEBAN                              | 31 Desember 2025   | 31 Desember 2024   | NAIK (TURUN) % |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa                          | 253.924.463        | 306.757.658        | -17,22%        |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota               | 28.448.000         | 29.204.000         | -2,59%         |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 0                  | 0                  | -              |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  | 0                  | 0                  | -              |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>282.372.463</b> | <b>335.961.658</b> | <b>-15,95%</b> |

#### D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun tidak memiliki Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Tahun Anggaran 2025. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

#### D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan  
Sosial Rp0

Pada Tahun Anggaran 2025, KPKNL Pangkalan Bun tidak memiliki Beban Bantuan Sosial. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

#### D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp532.203.526,0  
0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp532.203.526 dan Rp403.091.859. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.7 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2025 dan 2024*

| URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI                             | 31 Desember 2025   | 31 Desember 2024   | NAIK (TURUN) % |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin                               | 374.638.733        | 247.390.772        | 51,44%         |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan                               | 157.564.793        | 155.701.087        | 1,20%          |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan                          | -                  | -                  | -              |
| Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional | -                  | -                  | 0,00%          |
| <b>Jumlah Penyusutan</b>                                           | <b>532.203.526</b> | <b>403.091.859</b> | <b>32,03%</b>  |
| Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud                                 | -                  | -                  | -              |
| Beban Penyusutan aset lain-lain                                    | -                  | -                  | -              |
| <b>Jumlah Amortisasi</b>                                           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>       |
| <b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>                      | <b>532.203.526</b> | <b>403.091.859</b> | <b>32,03%</b>  |

#### **D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0*

Pada Tahun Anggaran 2025, KPKNL Pangkalan Bun tidak memiliki Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

#### **D.11. Kegiatan Non Operasional**

*Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional Rp0*

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.8 Rincian Kegiatan Non Operasional Semester II TA 2025 dan 2024*

| URAIAN                                                    | 30 JUNI 2025 | 30 JUNI 2024 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0%</b>      |
| <b>Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0%</b>      |
| Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya              | 0            | 0            | 0%             |
| <b>Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0%</b>      |
| Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar                  | 0            | 0            | 0%             |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0%</b>      |
| <b>Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0%</b>      |
| Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan                   | 0            | 0            | 0%             |
| Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran yang Lalu  | 0            | 0            | 0%             |
| Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu | 0            | 0            | 0%             |
| <b>Beban dari kegiatan non operasional lainnya</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0%</b>      |
| Beban Penyesuaian Nilai Persediaan                        | 0            | 0            | 0%             |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0%</b>      |

*\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini*

*tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

#### **D.12. Pos Luar Biasa**

*Pos Luar Biasa  
Rp0*

Pada Tahun Anggaran 2025, KPKNL Pangkalan Bun tidak memiliki Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1. Ekuitas Awal**

*Ekuitas Awal  
Rp19.422.623.306,  
00*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.422.623.306 dan Rp19.322.242.135

### **E.2. Surplus/Defisit-LO**

*Defisit LO  
Rp790.382.408,00*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp790.382.408 dan Rp57.713.130. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi**

*Dampak Kumulatif  
Perubahan  
Kebijakan  
Akuntansi Aset  
Rp0*

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama, yaitu sebesar Rp0.

#### **E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset**

*Penyesuaian Nilai  
Aset Rp0*

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama, yaitu Rp0. Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

#### **E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan**

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama, yaitu sebesar Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan adalah sebagai berikut:

*Tabel 5.1 Rincian Koreksi Nilai Persediaan Semester II TA 2025*

| Jenis Persediaan          | Koreksi  |
|---------------------------|----------|
| Barang Konsumsi           | -        |
| Suku Cadang               | -        |
| Barang Persediaan Lainnya | -        |
| <b>Jumlah</b>             | <b>-</b> |

#### **E.4.3 Selisih Revaluasi Aset**

*Selisih Revaluasi  
Aset Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap (Revaluasi BMN). Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 pada KPKNL Pangkalan Bun adalah sama, yaitu sebesar Rp0.

#### **E.4.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

*Koreksi Aset Tetap  
Rp0*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sama, yaitu sebesar Rp0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Peralatan dan mesin. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

*Tabel 5.2 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Semester II TA 2025*

| Jenis Aset Tetap    | Nilai Koreksi |
|---------------------|---------------|
| Peralatan dan Mesin | -             |
| Gedung dan Bangunan | -             |
| <b>Jumlah</b>       | <b>-</b>      |

#### **E.4.5 Koreksi Lain-lain**

*Koreksi Lain-lain  
Rp0*

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain

untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama, yaitu sebesar Rp0. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Tabel 5.3 Rincian Koreksi Lain-Lain Semester II TA 2025*

| Jenis Beban        | Jumlah Koreksi |
|--------------------|----------------|
| Koreksi Beban      | -              |
| Koreksi Pendapatan | -              |
| Koreksi Piutang    | -              |
| Koreksi Kewajiban  | -              |
| Koreksi Hibah      | -              |
| <b>Jumlah</b>      | <b>-</b>       |

### **E.5. Transaksi Antar Entitas**

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp921.929.457,00*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp921.929.457 dan Rp129.237.736. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 5.4 Rincian Transaksi Antar Entitas sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025*

| Uraian                               | Nilai              |
|--------------------------------------|--------------------|
| Dana yang Ditagihkan ke Entitas Lain | 1.711.660.246      |
| Dana yang Diterima dari Entitas Lain | (1.706.967.018)    |
| Transfer Keluar                      | 9.385.529          |
| Transfer Masuk                       | 907.850.700        |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>921.929.457</b> |

Rincian Transaksi Antar Entitas Terdiri dari:

#### **E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode

hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp1.711.660.246 sedangkan DKEL sebesar Rp1.706.967.018.

### **E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp917.236.229.

*Tabel 5.5. Rincian Transfer Masuk/Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025*

| No | Jenis                   | Entitas Asal      | Nilai              |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Peralatan dan Mesin     | Kantor Pusat DJKN | 102.475.700        |
| 2. | Kendaraan Bermotor      | Kantor Pusat DJKN | 867.326.923        |
| 3. | Akumulasi Penyusutan    | Kantor Pusat DJKN | (61.951.923)       |
| 4. | Transfer keluar - BYMHD | Kantor Pusat DJKN | 9.385.529          |
|    | <b>Jumlah</b>           |                   | <b>917.236.229</b> |

Sampai dengan semester II TA 2025, Transfer Masuk pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun berupa Peralatan dan Mesin (2 Kendaraan dan 9 unit laptop).

### **E.6 Ekuitas Akhir**

*Ekuitas Akhir*  
*Rp19.554.170.355,*  
*00*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.554.170.355 dan Rp19.393.766.741.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca hingga tanggal penyusunan Laporan Keuangan ini.

### **F.2 Pengungkapan Lain-lain**

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan sampai dengan semester II TA 2025 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun adalah sebagai berikut:

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Kuasa Pengguna Anggaran  | : Ari Fitri Mahesa                   |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Putri Sion                         |
| Pejabat PPSPM            | : Imam Syafii                        |
| Bendahara Pengeluaran    | : Ni'matul Ulya                      |
| Bendahara Penerimaan     | : Elisabeth Sangayu Puthu Krisnawati |

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional KPKNL Pangkalan Bun adalah:

- Virtual Account Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalan Bun A/C 650095063331000 a.n. BPG 102KPKNL Pangkalan Bun.
- Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalan Bun A/C 0282-01-000445-30-1 a.n. RPL 102 KPKNL Pangkalan Bun untuk Piutang.
- Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalan Bun A/C 0282-01-000798-30-6 a.n. RPL 102 KPKNL Pangkalan Bun untuk Lelang.
- Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalan Bun A/C 0282-01-001414-30-3 a.n. RPL 102 KPKNL Pangkalan Bun untuk PS TKPKN.

Jumlah piutang yang diurus oleh KPKNL Pangkalan Bun berikut barang jaminan yang dikelola adalah sebagai berikut:

**Piutang yang Diurus Per 31 Desember 2025**

| No                         | Penyerah Piutang                                                                                    | BKPN | Saldo Hutang                    | Barang Jaminan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                         | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi | 3    | Rp11.959.533.300,07             | a. Corporate Guarantee dari PT. Transindo Aspac Agroniaga;<br>b. Tabungan dari para Anggota Koperasi (fisik asli/fotokopi tidak ada dalam 1 bundel dokumen penyerahan);<br>c. Semua sertifikat an. Anggota Koperasi (dokumen jaminan tidak dikuasai dan fisik asli/fotokopi tidak ada dalam 1 bundel dokumen penyerahan). |
| 3.                         | RSUD Lamandau                                                                                       | 2    | Rp5.774.675,00                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.                         | Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan                                                                 | 1    | Rp96.043.336,00                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.                         | RSUD dr. Murjani Sampit                                                                             | 1    | Rp159.000.000,00                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.                         | Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya                                     | 1    | Rp810.223.524,00<br>\$44.070,84 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.                         | Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara                                                                  | 13   | Rp274.351.871,00                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Jumlah dalam rupiah</b> |                                                                                                     |      | <b>Rp13.145.926.706,07</b>      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Jumlah dalam dollar</b> |                                                                                                     |      | <b>\$44.070,84</b>              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |